

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) secara resmi mendeklarasikan fenomena *outbreak* virus Covid-19 sebagai pandemi global. Virus yang penyebarannya melalui transmisi *human-to-human* ini telah menimbulkan dampak masif yang dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Berdasarkan data yang diambil pada 17 Maret 2022, jumlah kematian akibat Covid-19 mencapai 6.099.380 orang. Jatuhnya korban jiwa tersebut menyiratkan bahwa pandemi telah mengekspos kelumpuhan sistem kesehatan dunia. Namun tidak hanya sebatas pada sektor kesehatan saja, penetapan standar *physical distancing* oleh WHO pada saat pandemi muncul juga memberikan dampak yang melebar ke aspek-aspek lain misalnya seperti terganggunya aktivitas ekonomi, perubahan kebijakan publik, berkurangnya keterlibatan serta partisipasi masyarakat sipil, dan mempengaruhi kesejahteraan populasi secara menyeluruh (Bedford et al., 2020).

Masyarakat internasional telah menaruh perhatian serius terhadap kesehatan sebagai bagian dari aspek kesejahteraan hidup setiap individu. Deklarasi Universal HAM pasal 25 paragraf 1 menyatakan bahwa “setiap individu memiliki hak atas standar kehidupan yang layak untuk kesehatannya dan kesejahteraan keluarganya, mencakup hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, sebagaimana mereka membutuhkan pelayanan kesehatan.” Pun di dalam pembukaan konstitusi World Health Organization (WHO) juga menyebutkan bahwa “standar kesehatan tertinggi merupakan hak fundamental setiap manusia dan tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, agama, keyakinan politik, keadaan ekonomi maupun sosial” (OHCHR, n.d.). Dengan begitu, setiap individu memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan kesehatan,

sementara negara berkewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing negara (Ardiansah, 2020).

Meskipun dihadapkan pada satu permasalahan sama yakni pandemi, namun setiap negara menunjukkan respon serta keefektifan yang berbeda-beda dalam pengimplementasian kebijakan. Tentu seorang pemimpin negara menempati posisi vital dalam perumusan kebijakan pada skala domestik. Mereka memiliki peran sentral dalam mendefinisikan dan menginterpretasikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh komunitas politik, lalu merumuskan solusi yang merangkul masyarakat dan *stakeholder* terlibat (Torfing & Sorenson, 2019). Solusi tersebut berupa kebijakan yang sifatnya mampu merepresentasikan pandangan kelompok terhadap konteks tertentu. Misalnya di dalam konteks penelitian ini, situasi pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat menuntut rasa aman. Namun di sisi lain, bagi para pembuat kebijakan, situasi ketidakpastian memicu rasa dilema mengingat bahwa setiap kebijakan yang dibuat akan berdampak langsung terhadap kondisi domestik suatu negara.

Sejak awal virus pecah menjadi pandemi, perempuan telah menjadi mayoritas tenaga kesehatan garda depan yang seharusnya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan untuk memperbaiki mekanisme pengawasan, pendeteksian dan pencegahan terhadap sistem kesehatan (UN Women, 2020). Keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan menjadi vital untuk menciptakan upaya kesiapan negara dalam menghadapi pandemi yang sifatnya berkelanjutan (Global Preparedness Monitoring Board, 2019). Namun nyatanya, hubungan internasional masih seringkali didominasi oleh karakteristik maskulin yang disematkan kepada seorang pemimpin.

Meski kini partisipasi perempuan dalam ranah publik sudah cukup berkembang, namun perempuan sebagai sosok pemimpin masih merupakan fenomena langka hingga saat ini

(Yusriana et al., 2021). Minimnya peran perempuan dalam politik dan pemerintahan membuat minimnya keterlibatan mereka sebagai *decision-maker* kebijakan suatu negara. Namun kemunculan beberapa pemimpin perempuan yang menunjukkan kapabilitasnya dalam menangani situasi krisis di negara mereka telah mematahkan perspektif tradisional serta stereotip maskulin pada seorang pemimpin. Stereotip ini merupakan generalisasi terhadap suatu individu yang tergolong sebagai anggota dari suatu kelompok. Sedangkan stereotip gender adalah generalisasi mengenai perbedaan sifat perempuan dan laki-laki (Heilman, 2012).

Pada saat awal kemunculan pandemi, narasi keberhasilan pemimpin perempuan dalam menangani pandemi dipopulerkan oleh media arus utama seperti *Times*, *Forbes*, *Vox*, *the Harvard Business Review* (Windsor et al., 2020). Narasi ini kemudian menjadi pembahasan di ranah akademik. Sisi feminin yang dimiliki oleh perempuan mempengaruhi kepribadian serta dimensi kognitifnya (Luoto & Varella, 2021). Salah satu sifat yang muncul adalah, ketika menghadapi situasi masyarakat di tengah-tengah kepanikan dan kebingungan, pemimpin perempuan cenderung bertindak melalui pendekatan *citizen-centered* dan mendemonstrasikan sisi kolaboratif, empati, dan emosional (Billing & Alvesson, 2020). Pemimpin-pemimpin perempuan ini telah menunjukkan kapabilitas untuk mengimplementasikan respon kebijakan secara cepat dan agresif serta melibatkan kerjasama antara negara, sektor publik dan privat, serta masyarakat melalui saluran komunikasi yang dilakukan oleh mereka (Mayer and May, 2021). Selain itu, para pemimpin perempuan ini juga lebih bersifat *risk-taking* dan berani memberlakukan langkah-langkah kebijakan yang sangat ketat dalam skala nasional, meskipun menyadari bahwa hal ini akan berdampak pada merosotnya sektor ekonomi negara (Garikipati dan Kambhampati, 2020).

Pada dasarnya, kebijakan yang diberlakukan oleh Jacinda Ardern dan Mette Frederiksen berfokus pada langkah-langkah preventif atau pencegahan dalam tahap awal. Di Denmark, Mette Frederiksen memberlakukan penutupan perbatasan sesaat setelah diumumkannya pandemi oleh WHO. Sementara, Selandia Baru sempat memberlakukan kebijakan *lockdown* nasional terhadap perbatasan negara mereka pada 25 Maret 2020 dan baru dibuka lagi dua tahun kemudian. Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya lah yang pada akhirnya juga ikut dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia. Namun yang membedakan tingkat keefektifannya adalah *timeframe* ketika kebijakan tersebut dilakukan. Karena kebijakan preventif akan lebih meminimalisir dampak pandemi apabila diimplementasikan sejak tahap awal ketika virus pertama kali terdeteksi. Dalam hal ini, *gendered leadership style* yang dibedakan antara pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan menjadi subjek yang membuktikan keberhasilan negara Selandia Baru dan Denmark dalam menavigasi pandemi Covid-19 di negaranya.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan akan berangkat dari pertanyaan kunci: “Bagaimana kemampuan *double bind* pemimpin perempuan mempengaruhi keberhasilan kebijakan negara Selandia Baru dan Denmark dalam menangani krisis pandemi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Menjelaskan mengenai aspek *political double bind* yang ditunjukkan oleh pemimpin perempuan, khususnya dalam konteks situasi krisis dengan menggunakan dua studi kasus, yakni negara Selandia Baru dan Denmark.

2. Menjelaskan mengenai kombinasi dari sifat maskulin dan feminin dari pemimpin Perdana Menteri Perempuan Jacinda Ardern dan Mette Frederiksen dalam merumuskan kebijakan di Selandia Baru dan Denmark.
3. Menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan yang diimplementasikan oleh Jacinda Ardern dan Mette Frederiksen mempengaruhi keberhasilan negara Selandia Baru dan Denmark dalam menangani situasi krisis pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kepentingan Akademik

Penulis berharap penelitian yang disusun ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh bagaimana aspek feminin dan maskulin pada seorang pemimpin dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan, khususnya dalam situasi krisis pandemi Covid-19. Penulis juga akan membahas mengenai bagaimana keberhasilan ini mematahkan anggapan-anggapan stereotip yang menghambat perempuan untuk menduduki posisi strategis di ranah publik, terutama dalam dimensi politik. Melalui penelitian yang disusun, penulis juga berharap bahwa penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan untuk memahami pengimplementasian serta relevansi dari asumsi-asumsi teori feminisme empiris dalam menganalisis isu-isu kontemporer yang muncul saat ini.

1.4.2 Kepentingan Praktis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat praktis yakni untuk mendorong penelitian berikutnya dengan topik yang serupa. Terutama

dalam menganalisis keberhasilan pemimpin perempuan dalam menunjukkan kemampuan *political double bind* dengan cara menyeimbangkan sisi maskulin dan feminin dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan di Selandia Baru dan Denmark dalam menangani situasi krisis pandemi Covid-19 dengan baik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 State of the Art

- a. Leading the Fight Against the Pandemic: Does Gender Really Matter (Supriya Garikipati & Uma Kambhampati, 2021)

Penelitian ini membandingkan perbedaan respon Covid-19 oleh pemimpin perempuan yang dinilai lebih baik daripada pemimpin laki-laki. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat feminim dari pemimpin perempuan yang respon cepat dan tegas dalam situasi ketidakpastian ketika krisis pandemi. Yang membedakan literatur penelitian ini adalah bahwasanya keberhasilan kebijakan Covid-19 dipengaruhi kombinasi sifat-sifat maskulin dan feminin dari pemimpin perempuan.

- b. Words matter: political and gender analysis of speeches made by heads of government during the Covid-19 pandemic (Sara Dada, Henry Ashworth, Marlene Bewa dan Roopa Dhatt, 2020)

Literatur ini menganalisis alat retorik serta perbedaan cara berkomunikasi antara pemimpin laki-laki dan perempuan dalam situasi krisis kesehatan. Komunikasi ini membentuk respon terhadap sektor kesehatan melalui dialog dan membangun kepercayaan publik di tengah-tengah masyarakat.

c. The COVID-19 Crisis Management: Male and Female Leaders' Success Factors as Perceived by Educated Arabs

Literatur ini membahas mengenai kemampuan manajemen krisis (*crisis management*) salah satunya dalam konteks pandemi Covid-19 dengan membandingkan negara yang dipimpin oleh pemimpin perempuan seperti Selandia Baru, Taiwan, Islandia, Finland, Norwegia, Denmark, dan Jerman serta negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin laki-laki seperti Amerika Serikat, Brazil, Russia, Spanyol, Italia, dan Prancis yang dilihat melalui nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh setiap negara. Yang membedakan penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini berupaya untuk menjelaskan keberhasilan pemimpin perempuan dalam menunjukkan performanya menangani pandemi melalui kaca mata feminisme empiris dan konsep *political double bind* yang belum digunakan oleh literatur-literatur lain yang dijadikan sebagai referensi.

1.5.2 Feminisme Empiris

Perdebatan mengenai ketiadaan peran perempuan dalam teori hubungan internasional klasik bukanlah suatu pembahasan yang baru. Tickner (2020), menyatakan bahwa sistem tatanan dunia secara alamiah bersifat hirarkis dan patriarkis. Kedua sifat juga sekaligus terletak pada “jantung” setiap negara yang notabeneanya dianggap sebagai *primary actor* dalam hubungan internasional. Sifat hirarkis dan patriarki yang kental dengan cara pandang maskulin ini juga melihat pola interaksi antar-negara seringkali didominasi oleh penggunaan kekuatan militer serta perang.

Bagi kaum feminis, pola interaksi antar aktor internasional didominasi oleh cara pandang maskulin dan kepentingan nasional adalah sesuatu yang diasosiasikan dengan

status, power, dan wealth (Rosyidin, 2020). Namun, pasca Perang Dingin, isu-isu mengenai permasalahan lingkungan, konflik etno-politik, diskriminasi serta opresi terhadap kelompok marginal semakin banyak bermunculan. Domain isu tersebut mengungkap keterbatasan perspektif klasik yang selama ini dominan namun ternyata tidak dapat menjelaskan fenomena-fenomena kontemporer. Teori klasik dianggap memberikan *dysfunctional response* ketika menjelaskan permasalahan serta tantangan baru terhadap isu keamanan manusia dan lingkungan di era sekarang ini (Blanchard, 2003). Sehingga teori feminisme memunculkan suatu perdebatan *gender-sensitive* terhadap perspektif-perspektif klasik terutama realisme yang erat kaitannya dengan kepentingan serta perang sebagaimana yang telah disinggung. Dalam studi HI, teori feminisme berkontribusi untuk “menawarkan” perspektif baru sebagai alat analisis kasus tertentu.

Perkembangan gerakan feminis sendiri diawali dengan gelombang pertama dimulai sejak abad 19 dimana gerakan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak yang sama bagi kaum perempuan. Selain itu, gerakan feminis gelombang kedua baru muncul pada akhir abad 20 yang menuntut pembebasan perempuan dari segala bentuk represi dan penindasan. Lalu gerakan feminis gelombang ketiga dipelopori oleh seorang tokoh, yakni Betty Friedan melalui bukunya yang berjudul *The Feminine Mystique* (1963). Pada saat itu, fenomena sosial yang sedang terjadi ialah keterbatasan peran perempuan dalam lingkungan sosial. Hal ini berkaitan dengan *gender expectation* masyarakat terhadap “peran ideal” seorang perempuan yang hanya menjadi seorang ibu dan istri. Di dalam kehidupan sosial, identitas perempuan dan laki-laki dikonstruksi secara sosial berdasarkan gender.

Tidak hanya mencerminkan karakteristik secara biologis, gender juga memunculkan ekspektasi masyarakat terhadap bagaimana seseorang harus berperilaku berdasarkan sifat feminin atau maskulin. Ekspektasi gender tersebut sekaligus mendikte mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku sesuai dengan standar masyarakat. Ini juga mempengaruhi pembagian pekerjaan yang diatribusikan kepada laki-laki dan perempuan. Masyarakat menganggap bahwa perempuan lazimnya bekerja di ranah domestik sementara laki-laki pantas bekerja di pekerjaan yang ranahnya publik, salah satunya adalah pemerintahan. Oleh sebab itu, deretan aktor politik negara selalu didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut menghambat perempuan untuk dapat berkontribusi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat publik secara luas. Namun tidak hanya terbatas pada pertentangan terhadap ekspektasi gender, gelombang ketiga gerakan feminisme ini juga sekaligus berupaya untuk memperluas konsep gender secara lebih inklusif dengan merangkul kelompok-kelompok marginal lainnya misalnya seperti kelompok LGBTQ+ dan kelompok rentan seperti anak-anak.

Asumsi dasar teori feminisme berangkat dari premis bahwasanya hubungan internasional merupakan pertarungan antara dominasi perspektif laki-laki (maskulin) atas perempuan (feminim). Selama ini, teori, konsep, dan hakikat kepentingan selalu diatribusikan dengan sifat-sifat maskulin yang memiliki karakteristik koersif. Hal ini menciptakan suatu struktur yang hirarkis, dimana laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi (superior), sementara perempuan dianggap memiliki posisi yang lebih rendah (inferior). Selain itu, pola interaksi antar-negara juga seringkali diwarnai dengan representasi laki-laki sebagai perwakilan suatu negara. Pada mulanya, jarang sekali perempuan yang dilibatkan langsung dalam praktik-praktik *high politics* dalam

hubungan internasional. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh ekspektasi dan konstruksi gender yang selama ini telah berusaha dipatahkan oleh kelompok feminis. Pola interaksi yang bias gender dalam relasi global ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dimana peran perempuan dalam hubungan internasional. Sehingga teori feminisme ini muncul dengan upaya untuk menjungkirkan segala bentuk dominasi dan opresi terhadap kelompok yang tertindas, terutama kaum perempuan dengan cara mendorong kebebasan, kesetaraan, serta keadilan terhadap kaum perempuan.

Teori feminisme empiris, sebagai salah satu cabang teori feminisme secara khusus mengkritik teori HI klasik yang cenderung mengabaikan perspektif perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam lingkup *global governance*, kaum feminis menentang sifat alamiah hubungan internasional yang didominasi oleh yang bersifat androsentris, dimana segala fenomena dijelaskan melalui sudut pandang laki-laki (Squires & Weldes, 2007). Bahkan dalam praktiknya, relasi antar-negara juga seringkali diwakilkan oleh praktisi laki-laki yang mengabaikan peran perempuan di dalam isu-isu *high politics* dan proses pengambilan keputusan. Connell dan Messerschmidt (2005) kemudian mendefinisikan hal ini sebagai cara pandang *hegemonic masculinism*.

Stereotip pemimpin sendiri seringkali diasosiasikan dengan karakteristik “maskulin”, dimana pemimpin diasumsikan adalah laki-laki yang memiliki sifat rasional, *management-oriented*, teknokratik, kuantitatif, *cost-driven*, hirarkis, pragmatis dan materialistis (Rost, 1991). Pemimpin laki-laki seringkali memperlihatkan karakteristik *transactional leadership* yang diasosiasikan sebagai kecenderungan untuk mengambil keputusan yang pasif dan menolak untuk berbuat apapun sampai suatu

situasi berubah menjadi kritis (Eagly, et al, 2003). Sementara, Eagly dan Blair (1990) menyatakan bahwa pemimpin perempuan cenderung memiliki sifat *interpersonally-oriented*, dimana perempuan cenderung senang untuk membentuk hubungan baru dengan orang lain. Hal ini juga didukung dengan kemampuan komunikasi yang baik, tegas, dan jelas dari pemimpin perempuan. Perempuan juga memiliki karakteristik lebih senang berkolaborasi sehingga keterlibatan perempuan dalam level *high politics* dianggap mampu merangkul berbagai macam kelompok masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada kebijakan yang sifatnya lebih inklusif dan efektif terhadap berbagai kalangan masyarakat.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Gender

Gender diartikan sebagai karakteristik seseorang yang terkonstruksi secara sosial berdasarkan perbedaan biologis jenis kelamin pada umumnya, yakni laki-laki dan perempuan. Gender menentukan adanya perbedaan standar norma, tingkah laku, serta peran yang diatribusikan kepada perempuan maupun laki-laki (WHO, n.d.). Pengkategorian individu yang dibedakan menjadi perempuan dan laki-laki ini menciptakan identitas serta menentukan posisi seseorang yang memengaruhi peranannya sehari-hari dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Konstruksi sosial berbasis gender ini mempengaruhi cara seorang perempuan atau laki-laki berpikir dan berperilaku sebagai produk akhir dari sosialisasi masyarakat. Masyarakat mengajarkan mengenai apa yang pantas dan tidak pantas untuk perempuan dan laki-laki melalui

peran gender (Purwanti, 2020). Mulai dari bagaimana seseorang harus berpakaian dan mengekspresikan emosi mereka.

Dalam hal ini, laki-laki yang secara biologis memiliki postur tubuh serta kekuatan yang lebih besar daripada perempuan menjadi lebih dominan tingkah lakunya. Sifat dominan, asertif, rasional yang dikombinasikan dengan peran gender laki-laki sebagai pencari nafkah membuat laki-laki lebih mudah diterima di kehidupan publik. Sedangkan perspektif tradisional menganggap bahwa posisi perempuan berada di bawah laki-laki (*subordinate*). Terlebih, perempuan juga cenderung kental dalam peran domestiknya di dalam rumah tangga. Hal ini membuat perempuan hanya memiliki sedikit ruang di kehidupan publik. Segmentasi ruang publik dan ruang privat ini ini menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara bebas dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya di masyarakat akibat konsekuensi dalam bentuk diskriminasi atau kekerasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa mulai dari tingkat mikro di rumah tangga hingga tingkat meso di masyarakat, peran individu pada umumnya tidak terlepas dari gender mereka (Purwanti, 2020)

Berbagai macam stereotip berbasis gender yang telah dijabarkan sebelumnya membuat pembahasan mengenai gender cenderung lekat dengan ketimpangan. Hal ini disebabkan oleh bagaimana sifat-sifat yang didasarkan oleh ekspektasi gender sangat mempengaruhi peluang sekaligus hambatan seseorang. Menyambung dari hal ini, perempuan seringkali dibatasi oleh stereotip berbasis gender di berbagai macam aspek dibandingkan laki-laki. Salah satunya dalam praktik ketenagakerjaan. Stereotip gender antara perempuan dan laki-laki menciptakan sistem pembagian kerja. Alhasil hal ini berpengaruh terhadap ketimpangan status dan kesejahteraan material antara perempuan

dan laki-laki di dalam pekerjaannya (Hyde, 2013). Inferioritas perempuan di berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat ini didukung oleh beberapa legitimasi, misalnya dari filsafat, doktrin agama, hingga hukum positif yang ada pada masyarakat (Purwanti, 2020).

Dalam hal ini, ekspektasi gender umumnya mengharapkan perempuan untuk memiliki sifat-sifat kolaboratif, empati, dan emosional (Billing & Alvesson, 2020). Empati didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain di situasi tertentu yang salah satunya disalurkan secara verbal melalui kata-kata (Zoll & Enz, 2012). Sedangkan emosional adalah suatu perasaan atau pikiran yang muncul yang mempengaruhi atau mendorong kecenderungan seseorang untuk bertindak (Goleman *et al.*, 2002). Sementara itu, laki-laki diharapkan untuk memiliki sifat-sifat seperti rasional, tegas, dan berani mengambil resiko (Dunne *et al.*, 2013; Berni, 1974). Oleh Richetto dan Tregoe (2001), rasional ini diartikan oleh kemampuan seseorang untuk mempertimbangan aspek dan menganalisis informasi pada suatu konteks kejadian berdasarkan fakta dan data.

1.6.1.2 Kepemimpinan Transformasional (*Transformational Leadership*)

Diskusi mengenai kepemimpinan dapat dikaitkan dengan relasi gender (Billing & Alvesson, 2000). Hingga saat ini posisi pemimpin masih seringkali didominasi dengan laki-laki dan hal ini berdampak pada konstruksi atau cara pandang terhadap seorang pemimpin (Madsen & Albrechtsen, 2020; Tienari *et al.*, 2005). Sosok pemimpin masih kental dengan cara pandang tradisional, yang mana seorang pemimpin diasosiasikan dengan kepemimpinan karismatik (*charismatic leadership*) yang terbentuk dari bagaimana masyarakat mempersepsikan pemimpinnya. Kepemimpinan

transformatif menekankan pada beberapa sisi negatif dari sifat maskulin misalnya seperti manipulatif, menutupi dan menyalahkan orang lain atas suatu kesalahan, serta menganggap remeh suatu bentuk kritik (Yukl & Howell, 1999)

Kepemimpinan transformatif (*transformational leadership*) merupakan bentuk respon dari aspek negatif dari kepemimpinan karismatik (Madsen & Albrechtsen, 2020). Kepemimpinan transformatif ini merupakan kombinasi antara kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan partisipatif. Berbeda dengan kepemimpinan karismatik seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kepemimpinan partisipatif justru menekankan pada kolaborasi seorang pemimpin dengan pihak-pihak lainnya. Selain itu, pada kepemimpinan partisipatif juga terdapat beberapa nilai feminin, misalnya seperti kolaboratif, empati, dan emosional (Billing & Alvesson, 2020). Madsen dan Albrechtsen (2020) berpendapat bahwa perempuan lebih erat kaitannya dengan elemen partisipatif dalam kepemimpinan transformatif. Meskipun konsep kepemimpinan transformatif tidak secara spesifik mengkaitkan dengan aspek kategori sosial yang terbagi menjadi maskulin dan feminin, serta laki-laki dan perempuan, namun elemen konstruksi identitas seringkali dikaitkan dengan sosok pemimpin untuk menilai kapasitas seseorang sebagai sosok pemimpin (Madsen & Albrechtsen, 2020).

1.6.1.3 Political Double Bind

Merujuk pada konsep gender, narasi mengenai sosok pemimpin berkaitan dengan sejumlah karakteristik yang diekspektasikan kepada seseorang ketika menempati posisi sebagai pemimpin. Masyarakat publik seringkali mengaitkan seorang pemimpin dengan sifat-sifat stereotip yang diatribusikan kepada laki-laki. Stereotip dan ekspektasi gender

ini akan menciptakan bias gender secara halus terhadap perempuan yang berada di posisi kepemimpinan (Alexander & Andersen, 1993; Bauer, 2015; Barnes & Beaulieu, 2014, Bos, 2014; Holman *et al*, 2016). Alhasil, meskipun perempuan memiliki potensi untuk memimpin pemerintahan, memungkinkan bagi mereka untuk tersisihkan karena tidak memenuhi tipe ideal seorang pemimpin bagi masyarakat yang menjadi faktor kurangnya representasi perempuan pada pemerintahan (Teele *et al*, 2018).

Bias gender terutama di dalam konteks politik ini disebut sebagai *double bind*. Dari sini, muncul *competing roles* terhadap sosok pemimpin perempuan yang dibebankan oleh dua ekspektasi gender yang mengharuskan mereka memenuhi peran sebagai seorang pemimpin, sekaligus sebagai perempuan (Paxton & Hughes, 2014). Ketika perempuan menunjukkan sifat sosok pemimpin seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mereka dianggap kompeten, tetapi akan kurang disukai karena “merusak” harapan publik mengenai apa yang mereka percayai bagaimana seorang perempuan harus bertindak. Sebaliknya, pemimpin perempuan akan lebih disukai apabila mereka memenuhi stereotip sifat yang diharapkan ada pada perempuan, tetapi akan dipandang kurang kompeten sebagai seorang pemimpin. Sehingga perempuan sebagai pemimpin dapat dianggap kompeten atau disukai, namun jarang keduanya (Catalyst, 2018).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Gender

Gender meliputi perbedaan biologis secara tradisional terbagi atas perempuan dan laki-laki. Norma gender yang diciptakan oleh konstruksi sosial mengharapkan

perempuan untuk memiliki sifat kolaboratif, empati, dan emosional. Sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, tegas, dan berani mengambil resiko.

1.6.2.2 Kepemimpinan Transformasional (*Transformational Leadership*)

Kepemimpinan transformasional merupakan kombinasi dari kepemimpinan karismatik dan partisipatif. Kepemimpinan karismatik diasosiasikan dengan sifat maskulin seperti rasional, tegas, dan berani mengambil resiko. Sedangkan kepemimpinan partisipatif lebih menekankan sifat-sifat feminim yakni kolaboratif, empati, dan emosional.

1.6.2.3 Political Double Bind

Masyarakat mengasosiasikan sifat-sifat pemimpin sebagai sifat yang rasional, tegas, dan berani mengambil resiko. Sifat-sifat tersebut merupakan apa yang distereotipkan kepada laki-laki. Sedangkan perempuan diasosiasikan dengan sifat-sifat kolaboratif, empati, dan emosional.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian ini adalah bahwa keberhasilan kebijakan negara Selandia Baru dan Denmark menangani krisis pandemi tidak terlepas dari kemampuan *political double bind* Jacinda Ardern dan Mette Frederiksen yang mampu menyeimbangkan aspek-aspek feminin dan maskulin pada seorang pemimpin.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam pemecahan permasalahan suatu studi kasus. Penelitian kualitatif akan berfokus untuk memahami fenomena

sosial melalui gambaran serta pemahaman yang mendalam dengan didukung oleh pengumpulan data-data empiris (Mashyuri, 2011). Adapun data-data yang digunakan sebagai bahan penunjang dalam penelitian kualitatif ini diperoleh melalui metode *desk research* atau studi kepustakaan. Data-data ini bersifat sekunder dan dihimpun melalui internet. Adapun sumber yang diperoleh berasal dari jurnal, artikel, buku, arsip-arsip resmi, situs berita, informasi media massa, hasil atau kajian penelitian sebelumnya serta berbagai macam dokumen lain yang relevan dengan topik yang diangkat ke dalam penelitian ini (Moloeng, 2002). Selain itu, penulis juga akan menganalisis melalui wawancara subjek terkait. Dengan sumber-sumber data tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan serta pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin perempuan di Selandia Baru dan Denmark pada saat pandemi yang dihubungkan dengan kepercayaan publik.

Sedangkan untuk teknik analisis data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kongruen. Metode ini dilakukan dengan cara mencari kecocokan antara pertanyaan penelitian dengan metode serta data-data yang diperoleh untuk mendapatkan validitas pada penelitian (Thurston et al, 2014). Metode ini juga dilakukan untuk mengetahui relevansi teori yang digunakan dalam menjelaskan suatu studi kasus sebelum akhirnya ditarik sebuah kesimpulan (Albert et al, 2010).